

PERAN RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) PALANGKARAYA DALAM MEDIA KOMUNIKASI POLITIK DI KALIMANTAN TENGAH

Oleh

Srie Rosmilawati

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Radio Republik Indonesia (RRI) Palangkaraya dalam media komunikasi politik di Kalimantan Tengah.

Metode penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti berupaya menganalisis peran dari RRI Palangkaraya dengan melakukan interpretasi dan disesuaikan dengan data-data yang ada termasuk memadu padankan data primer dan sekunder.

Dalam kegiatan politik pada struktur dan bentuk apa pun, tidak akan terlepas dari tingkah laku manusianya sebagai penggerak kegiatan politik. Komunikasi Politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya komunikasi politik sangat kental terhadap berbagai aktifitas baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tenggang waktu tertentu seperti pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah tahun 2010, Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2009 sehingga RRI Palangkaraya sebagai salah satu Lembaga Penyiaran Publik memiliki peran dalam media komunikasi politik di Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pemerintah, RRI bersifat independen, netral, tidak komersial yang bertujuan memberikan pelayanan kepada publik dalam hal informasi, pendidikan, budaya, hiburan dengan memberikan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar dan hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat serta mengekspresikan diri melalui program-program siarannya. Dengan demikian RRI Palangkaraya dianggap mampu memberikan informasi up to date mencapai pelosok pedesaan termasuk berhubungan dengan informasi-informasi politik

Kata Kunci: Motivasi, Peran, Media Komunikasi.

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan politik pada struktur dan bentuk apa pun, tidak akan terlepas dari tingkah laku manusianya sebagai penggerak kegiatan politik tersebut.

Perilaku manusia dalam kehidupan politik ini sebagai perilaku yang tidak terpisahkan dari kelompok, golongan atau partai. Dalam tinjauan psikologis setiap individu yang berada dalam situasi kebersamaan, akan menunjukkan gejala-gejala yang berbeda dibanding dengan individu yang bebas tidak terikat oleh sesuatu kelompok atau golongan. Alam perasaan atau emosi biasanya akan terbawa hanyut oleh arus kelompok tersebut. Adakalanya 'Personality' tiap-tiap individu akan hilang, yang tinggal hanyalah ciri-ciri tingkah laku kelompok.

Dalam konsep ilmu komunikasi perilaku kelompok ini sebagai suatu objek yang selalu diteliti dan dijadikan studi

perbandingan tentang sifat bentuk, karakter sehubungan dengan komunikasi yang efektif.

Demikian pula dalam studi ilmu politik melihat tingkah laku kelompok ini sebagai suatu gejala yang ada dalam Infrastruktur yang erat kaitannya dengan sistem dan tata nilai yang berlaku dalam ruang lingkup pemerintah atau negara.

Terhadap perilaku ini, baik ilmu politik maupun ilmu komunikasi memperhatikan dari dua sudut pandang yang sama yaitu tingkah laku manusia yang dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk kegiatan suatu sistem politik. Hal ini rasional, karena membicarakan suatu sistem politik bukan membicarakan benda-benda mati tapi membicarakan 'peran manusia' dalam ruang lingkup yang diberi nama dan dilengkapi berbagai atribut, Negara, Politik, Pemerintah, sistem dan aneka macam bentuk lain.

Semua atribut digunakan oleh manusia dalam kegiatannya sebagai sebagai upaya mempertahankan hidupnya. Bahkan dalam kehidupan berpolitik manusia memakai berbagai bentuk cara untuk berkomunikasi salah satunya dengan media audio/ RRI mengingat lembaga ini sudah independen dalam menyiarkan berita-berita yang diperlukan masyarakat, sehingga bisa memenuhi kebutuhan penggunanya.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka kelembagaan yang semula berbentuk Perusahaan Jawatan RRI telah berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut dalam pasal 1 ayat 2, Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk itu LPP RRI sebagai salah satu media elektronik milik Negara bertujuan memberikan pelayanan kepada publik dalam hal informasi, pendidikan, budaya, hiburan dengan memberikan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar dan hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat serta mengekspresikan diri melalui program program siarannya.

Bentuk komunikasi massa berbagai macam maksud dan tujuan publik dalam menjalankan komunikasi ada yang bertujuan untuk politik sosial dan budaya.

Tingkah laku politik seperti ini juga menjadi perhatian pula dalam kegiatan politik, karena komunikasi politik seperti ini yang berpengaruh secara efektif terhadap situasi politik, sistem politik dan kegiatan politik. Karena jaringan-jaringan komunikasi yang ada infrastruktur Yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal dimobilisasi untk maksud-maksud politik di dalam merebut atau memperoleh kekuasaan politik.

Misalnya saja pencitraan, iklan partai kelompok organisasi massa dan publikasi yang lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan politik fungsinya berkomunikasi dengan massa adalah untuk menarik perhatian massa sebanyak-banyaknya

Komunikasi politik dalam internal communication (komunikasi internal), yaitu seluruh individu yang berada pada infrastruktur politik, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar dan asosiasi-asosiasi serta lembaga-lembaga yang erat kaitannya dengan kehidupan politik.

Opini yang di siarkan lewat radio tersebut dapat menggerakkan sejumlah besar individu manusia yang disebut massa baik untuk kepentingan yang bersifat konstruktif ataupun yang bersifat destruktif. Bahkan untuk merebut kekuasaan (*power*) atau untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah dapat pula menggunakan militansi dari massa ini.

Massa terbentuk karena suatu ikatan atau didasari oleh adanya aliran pikiran tertentu. Unsur-unsur karakteristik massa menurut Herbert Blumer sebagai berikut:

- (1). Massa terdiri dari orang-orang dari segala lapangan dan strata dalam masyarakat,
- (2). Mereka bersifat anonim dan heterogen,
- (3). Di antara mereka tidak terdapat interaksi atau pertukaran pengalaman,
- (4). Massa longgar dalam ikatan organisasi (*loosely organized*), sehingga tak mampu bertindak secara teratur dan terarah.

Dr. Gerhart D. Wiebe menyatakan bahwa ditinjau dari segi psikologis, massa tidak mempunyai status dalam masyarakat (*no status connotation*), melainkan manandakan suatu jumlah orang yang sangat besar. Sifatnya heterogen yang terdiri dari segala stratifikasi masyarakat dengan status sosial yang berbeda terdapat di dalamnya kaum terpelajar, yang kaya dan yang miskin.

Dari sudut pandangan sosiologis massa itu bersifat konkret dapat dilihat dalam jumlah yang besar yang mempunyai militansi yang tinggi. Karenanya massa selalu berhubungan dengan objek yang serba luar biasa dan hebat atau menakjubkan.

Sebagai syarat utama bagi suatu massa baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yaitu harus adanya ikatan pikiran, pertalian jiwa atau persamaan perasaan.

Ikatan pikiran ditentukan oleh suatu ikatan ideologi atau ajaran, keyakinan, gagasan dan falsafah. Sedangkan pertalian jiwa diikat oleh suatu perasaan senasib, sepenanggungan, tidak mengingat kaya atau miskin yang tumbuh dalam jiwa massa sifat benci dan sentimen terhadap objek yang di luar kelompok massa tersebut.

Kita perhatikan tulisan Denis de Rougemont dalam '*Journal d'Allemagne*' (kitab harian tentang Jerman) menggambarkan bagaimana sejumlah besar massa yang dapat dikuasai oleh satu orang saja. Hal ini terjadi pada rapat raksasa pada '*Maifeld*' di kota Berlin tanggal 28 September 1937, yang dihadiri tidak kurang dari 1.000.000 orang. Juga Seperti yang telah dilakukan tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia pada waktu tempo dulu pada waktu mengobarkan semangat para penduduk Indonesia dalam melawan penjajah melewati saluran radio RRI. di lihat dari situ betapa penting peran media audio berupa radio dalam membentuk opini masyarakat baik di era dahulu maupun sekarang.

LANDASAN TEORI

Pengertian Peran

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan

suatu peran. kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Persepsi Peran

Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (role perception). Berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran (role expectation) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana anda bertindak.

Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (role conflict). Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

Teori Peran

Teori Peran Menurut Para Ahli :

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan□

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan

bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran.

Meski kata 'peran' sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.

Media Komunikasi Politik

Media komunikasi politik adalah suatu bentuk informasi yang sangat penting bagi diri kita maupun orang lain dikomunikasikan baik di dalam komunikasi politik yang menyangkut partai politik.

Media dalam sebuah komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Tentunya dengan tujuan khalayak mengetahui agenda politik setelah itu simpati dan menjatuhkan pilihannya kepada partai tersebut. Siapapun komunikator atau aktivis politik akan berusaha untuk menguasai media. Tak heran, barang siapa yang telah menguasai media, maka dia hampir memenangi pertarungan politik. Semenjak kemajuan teknologi dan informasi yang revolusioner, media cetak maupun elektronik mengantarkan informasi kepada khalayak sangat efektif. Pemanfaatan media untuk mendongkrak popularitas sebenarnya telah mulai marak dan bebas sejak Pemilu 1999 dan semakin menguat di Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009. Segala kegiatan yang ada nuansa politik diangkat media bertujuan tak hanya sebagai sarana publisitas namun juga mempengaruhi khalayak untuk memilihnya.

Oleh sementara pihak media, media massa sering disebut sebagai the fourth estate dalam kehidupan sosial ekonomi. Hal ini terutama disebabkan oleh peran suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media massa dalam kaitannya dengan

pengembangan kehidupan sosial ekonomi dan politik masyarakat. Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Antara lain karena itu, media massa juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.

Saluran Komunikasi politik

Saluran komunikasi adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Pesan di sini bisa dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan seperti kata, gambar, maupun tindakan. Atau bisa pula dengan melakukan kombinasi lambang hingga menghasilkan cerita, foto (still picture atau motion picture), juga pementasan drama. Alat yang dimaksud di sini tidak hanya berbicara sebatas pada media mekanis, teknik, dan sarana untuk saling bertukar lambang, namun manusia pun sesungguhnya bisa dijadikan sebagai saluran komunikasi. Jadi, lebih tepatnya saluran komunikasi itu adalah pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya. Komunikator politik, siapapun ia dan apapun jabatannya, menjalani proses komunikasinya dengan mengalirkan pesan dari struktur formal dan non-formal menuju sasaran (komunikan) yang berada dalam berbagai lapisan masyarakat.

Sedangkan, politik seperti komunikasi adalah proses dan seperti komunikasi politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai dan pakaian. Ilmuwan politik Mark Roelofs menyatakan dengan cara sederhana, komunikasi Politik adalah pembicaraan, atau lebih tepat kegiatan politik

(berpolitik) adalah berbicara. ia menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi hakekat pengalaman politik dan bukan kondisi dasarnya, ialah bahwa kegiatan berkomunikasi antara orang-orang.

Maka dengan hadirnya media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudah kepada setiap komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak.

Begitu berkuasanya media dalam mempengaruhi pikiran, peranan, dan perilaku penduduk, sehingga Kevin Philips dalam buku *responsibility in mass Communication* mengatakan, bahwa era sekarang lebih merupakan *mediacracy*, yakni pemerintahan media, daripada demokrasi pemerintahan rakyat.

Kekuatan media massa (*powerfull media*) sebagai saluran untuk mempengaruhi khalayak, telah banyak memberikan andil dalam pembentukan opini publik. Kemampuan melipatgandakan pesan-pesan politik di media massa mempunyai dampak terhadap berubahnya perilaku pemilih. Maka dari itu, bagi para elit politik yang ingin bertarung memperebutkan kursi kekuasaan, akan berusaha memanfaatkan media massa untuk tujuan publikasi dan pembentukan citra. Media dalam bentuk apapun adalah saluran komunikasi seorang kandidat kepada khalayak yang dikatakan efektif dan efisien pada masa kampanye modern saat ini. Ada beberapa media yang sangat penting dalam mempublikasikan agenda politik:

Media telepon; merupakan alat komunikasi lisan satu-kepada-satu yang memiliki beberapa kegunaan bagi kampanye kontemporer. Media ini kerap digunakan bagi hubungan pribadi jika organisasi kampanye ingin mengumpulkan dana, mengarahkan pemilih untuk datang ke tempat kampanye. Atau terkadang media telepon juga biasa digunakan untuk memperkenalkan kandidat melalui rekaman suara yang dapat diputar berulang kali. Telepon pun hingga saat ini

masih digunakan sebagai media survey tentang opini para pemilih; polling telepon, dengan menggunakan sistem pemutaran nomor secara acak disertai kuesioner pendek yang mudah dipahami; prosedur utama survey.

Media radio, Menurut McLuhan, terdapat resonansi antara radio dan telinga serta pikiran manusia, resonansi yang menyajikan peluang besar bagi kampanye radio. Di samping itu, radio juga merupakan saluran massa bagi kaum minoritas walaupun dalam perkembangannya kaum mayoritas pun masih belum bisa meninggalkannya. Meskipun radio tidak menampilkan visual/gambar hidup, namun media satu ini bisa merambah ke lokasi di mana media lain susah bahkan tak bisa menjangkaunya.

Media Televisi, Di Amerika, penggunaan televisi sebagai media kampanye sudah sejak dasawarsa 1950-an dan 1960-an dimulai. Penekanan dalam kampanyenya pun beragam, mulai dari pembuatan citra; di mana penggunaan media ini untuk memproyeksikan atribut-atribut terpilih dari kandidat. Hingga penekanan berkembang pada tahun 1970-an menjadi pengaturan

Peran Media dalam Komunikasi Politik

Dalam peran media komunikasi politik, pada dasarnya memiliki enam peran dasar sebagai suatu sub sistem dari sebuah sistem politik dan sistem komunikasi.

1. Penyampai Informasi

Pada dasarnya media komunikasi politik merupakan sarana penyampaian arus informasi politik dari aktor politik maupun pemerintah kepada rakyat secara meluas.

2. Penyalur Aspirasi

Media komunikasi politik kini juga berkembang sebagai media penyampai aspirasi dari rakyat kepada pemerintah, yakni dari individu bagian dari rakyat kepada pemerintah yang juga dapat diketahui oleh rakyat secara luas.

3. Penghubung Pemerintah dan Rakyat

Media komunikasi politik merupakan salah satu jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya serta

sebaliknya antara rakyat dengan pemerintahnya.

4. Umpan Balik

Media komunikasi politik juga dapat berperan menjadi sarana memberikan umpan balik kepada apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dengan media komunikasi politik, rakyat dapat memberikan tanggapan atas kebijakan yang dikeluarkan apakah merugikan bagi rakyat ataukah menguntungkan rakyat.

5. Sosialisasi Politik

Media komunikasi politik juga berperan menjadi agen sosialisasi politik bagi rakyat. Bahwa media sosialisasi politik dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada rakyat secara luas terkait dengan kebijakan ataupun problema dan isu politik tertentu. Seperti saat pesta demokrasi atau pemilu media memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan sosialisasi ke pada masyarakat secara luas.

6. Kontrol Sosial

Media komunikasi politik dapat berperan sebagai pihak yang ikut mengawasi pemerintah bersama dengan rakyat. Dimana media komunikasi politik ini dapat dijadikan sebagai pengawas, pengkritik, pemberi masukan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, dimana peneliti berupaya menganalisis peran dari RRI Palangkaraya dengan melakukan interpretasi dan disesuaikan dengan data-data yang ada. metode dengan menggunakan metode ex post facto serta padu serasi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan sumber data sekunder antara lain berupa undang-undang, peraturan-peraturan, kode etik jurnalistik, dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan bahan data sekunder dalam penelitian ini, akan dilengkapi oleh data

primer yang menjadi sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

HASIL PENELITIAN

Dalam rangka memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat terutama dalam pelaksanaan pemilu baik Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010, Legislatif maupun Pemilihan Presiden Tahun 2009 RRI Palangkaraya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan siaran pemilu sesuai dengan tahapan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat jauh sebelum pemilihan umum berlangsung mengetahui tata cara pemilu yang baik dan benar sesuai peraturan pemerintah tentang pemilu, tahapan pemilu dilaksanakan seperti diawali pendaftaran pemilih hingga pencontrengan dari yang semula memakai sistim pecoblosan semua berita mengenai tahapan pemilu RRI menyiarkan baik langsung maupun tidak langsung melalui paket acara yang dikemas beragam format dari news, interaktif, majalah udara, radio spot, berita bahasa banjar dan obrolan serta acara lain baik di pro 1, pro 2, dan pro 4 kesemua format yang dikemas tersebut penekanannya kepada masyarakat supaya masyarakat berperan serta dalam mensukseskan pemilu yang di adakan pemerintah atau masyarakat tidak melakukakan Golongan Putih (golput).

Tahapan-tahapan dalam pemilihan umum disiarkan di RRI, mulai dari pendataan calon pemilih, jumlah partai, tata cara memilih partai maupun anggota dewan juga di siarkan oleh RRI bahkan sampai kegiatan pada waktu hari pemilihan pun RRI tidak mau ketinggalan dengan media yang lain yang mengadakan penyiaran *Quick Report* (penghitungan Cepat) Dalam tehnis pelaksanaan yang dimulai pukul 07.00 wib hingga berakhir penghitungan suara RRI Palangkaraya selain menerjunkan para reporter keseluruh kabupaten dan kota, juga melibatkan kontributor untuk melakukan *Quick Report* (penghitungan Cepat) melalui sms yang dikirim langsung ke media center untuk disiarkan pada saat itu juga agar masyarakat

mengetahui hasilnya, secepatnya, meskipun dalam angka yang berfluktuasi.

Meskipun dalam melaksanakan kegiatan tersebut sudah tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi diantaranya antara lain:

1. Petugas pemungutan suara masih enggan memberikan catatan dari hasil penghitungan suara sementara.
2. Peralatan komunikasi (handphone) tidak berfungsi dengan baik.
3. Kurangnya personel untuk petugas di lapangan

Meskipun animo masyarakat dalam mendengarkan radio tidak sebesar menonton TV tetapi RRI sudah memberikan sajian informasi yang sangat penting bagi masyarakat dalam hubungan komunikasi politik. Yang telah di kemas dalam berbagai acara dan waktu yang telah di tata begitu baik siaran siaran tersebut melewati saluran 4 (empat) maupun 1(satu) dan 2 (dua).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Radio Republik Indonesia (RRI) telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang telah di amanatkan dalam Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka kelembagaan yang semula berbentuk Perusahaan Jawatan RRI telah berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2. RRI bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. sesuai dengan Menurut Peraturan Pemerintah tersebut dalam pasal 1 ayat 2, Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara,

3. RRI bentuk komunikasi massa berbagai macam maksud dan tujuan publik dalam menjalankan komunikasi.ada yang bertujuan untuk politik, sosial, dan budaya.
4. RRI melakukan fungsinya sebagai salah satu media elektronik milik Negara bertujuan memberikan pelayanan kepada public dalam hal informasi, pendidikan, budaya, hiburan dengan memberikan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar dan hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat serta mengekspresikan diri melalui program program siarannya.

Telah memberikan laporan yang up to date dalam jaringan yang paling luas yang bisa di akses sampai ke pelosok-pelosok pedesaan

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan

1. Lebih peningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di lingkungan RRI untuk menjaga dan meningkatkan persaingan produk.
2. Memutakhirkan peralatan yang dimiliki sekarang ini untuk menunjang pelaksanaan penyiaran sehingga tujuan penyiaran bisa tercapai.
3. Lebih inovatif dalam mengemas acara yang akan di publikasikan supaya tidak di tinggalkan oleh pendengar bahkan lebih di cintai oleh publik.
4. Mengadakan koordinasi dengan baik dengan pihak-pihak lain untuk menunjang mendapatkanya informasi yang up to date.

REFERENSI

Bauer, Jeffrey C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity.Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States

Nurudin. *Hubungan Media Konsep dan Aplikasi*; Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo \persada, 2008

Nimmo, Dan. 1999. *Political Communication and Public Opinion in America*. Terjemahan: Tjun Surjaman. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nimmo, Dan. 2000. *Political Communication and Public Opinion in America*. Terjemahan: Tjun Surjaman. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Ruslan, Rosady. *Manajemen. Public Relations dan media komunikasi: konsepsi dan aplikasi; Edisi Revisi*. Cet 8. Jakarta: PT Raja Grafindo \persada, 2007

Rauf, Maswadi dan Mappa Nasruni, Editor. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudiby, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Cetakan I.LKIS Yogyakarta

Sumarno. 1989. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. Bandung. Citra Aditya Bakti

Zainuddin, A.Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta, Gramedia Pustaka

www. google.com, kata kunci media komunikasi politik

Teori dari buku Raho tahun terbit 2007

Peraturan Perundang- Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran.